

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa serta kemakmuran. Tambahan nilai dan kemakmuran ini diciptakan oleh individu wirausaha yang memiliki keberanian menanggung resiko, menghabiskan waktu, serta menyediakan berbagai produk barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh wirausaha tidak hanya barang yang baru, tetapi nilai yang baru dan berguna (Suryana, 2008: 13). Wirausaha adalah seorang yang mandiri, yaitu orang yang memiliki perusahaan sebagai sumber penghasilannya. Dengan kata lain, ia tidak menggantungkan diri untuk penghasilannya kepada orang lain (Basrowi, 2011: 6). Wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha/kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Munculnya usaha-usaha yang dijalankan oleh petani mengandung arti bahwa petani memiliki persepsi bahwa kewirausahaan dianggap menjadi sebuah pilihan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta menunjukkan adanya peningkatan jumlah wirausaha yang bekerja secara mandiri, yang mampu menciptakan lapangan kerja dimana tiap usaha pengolahan gula merah umumnya mempekerjakan beberapa orang. Hal ini dapat dilihat dari peranan kewirausahaan itu sendiri bukan sekedar mencakup upaya peningkatan output dan pendapatan per kapita tetapi meliputi upaya menimbulkan perubahan pada struktur bisnis dan masyarakat (Winardi, 2003: 175).

Kewirausahaan merupakan penggerak utama dalam mempercepat pemulihan dan perkembangan perekonomian suatu bangsa. Peran kewirausahaan selain dalam peningkatan output dan pendapatan per kapita, juga berperan sebagai pemacu ekspor, penyerap tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Pentingnya kewirausahaan dalam meningkatkan perekonomian sebagaimana menurut Acs (2008:12) yang menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi didorong oleh empat faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Aktivitas kewirausahaan merupakan *leader* yang dapat menggerakkan faktor-faktor lainnya, karena seorang wirausaha akan menggunakan keahlian kewirausahaannya untuk mengorganisasi tanah, modal dan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Disamping itu, wirausaha berperan dalam pembangunan

ekonomi dengan menghasilkan dan mewujudkan gagasan-gagasan yang inovatif, diantaranya inovasi produk, proses, pemasaran dan organisasi. Adanya inovasi dapat meningkatkan pangsa pasar dan pengembangan perusahaan, yang pada akhirnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, serta meningkatnya efisiensi pasar dengan semakin bertambahnya wirausaha yang sukses (Acs, 2008:13).

Kewirausahaan di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu usaha dengan tenaga kerja tetap, usaha dengan tenaga kerja buruh, dan usaha tanpa tenaga kerja. Kriteria ini merupakan karakteristik sektor swasta yang berkembang luas di Indonesia. Sektor swasta memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan pekerjaan, pendapatan nasional, sehingga tercipta kesejahteraan dan daya saing. Kewirausahaan dinilai sebagai faktor utama dalam menggerakkan perekonomian (Vincent 2005:34) dengan mempengaruhi kinerja ekonomi, memperkenalkan inovasi, menciptakan perubahan, serta meningkatkan persaingan dan kesejahteraan (Baig, 2007:12). Kewirausahaan berfungsi sebagai pendorong kapasitas inovatif dan potensi pertumbuhan suatu wilayah (Nikels *et al.* dalam Pambudy 2010:23). Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan bagian terbesar dari usaha privat di suatu negara berkembang berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pencipta kesejahteraan masyarakat serta berperan sebagai pusat kreativitas, inovasi, dan penciptaan kewirausahaan di masyarakat (Baig 2007:12). Sebagian besar UMK berada di pedesaan dan berperan penting dalam titik awal untuk pengembangan kewirausahaan pedesaan, khususnya bagi perempuan (Musnidar and Tambunan 2007:31).

Bagian terbesar dari perusahaan swasta atau wirausaha di Indonesia bergerak pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Jumlah UMK di Indonesia mencapai 99 persen dari total perusahaan swasta yang berdiri serta memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Nasional mencapai 45.49 persen dan serapan tenaga kerja sebesar 94.21 persen pada tahun 2015 (Kementerian Koperasi dan UKM 2016). UMK memiliki peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan, output, dan nilai tambah, sebagai pusat kreativitas dan inovasi, serta pencipta dan titik awal pertumbuhan kewirausahaan mikro di masyarakat (Baig 2007:22, Musnidar dan Tambunan 2007:15). UMK, khususnya usaha mikro, pada umumnya didominasi oleh usaha mandiri atau *self-employment* tanpa tenaga kerja yang

dibayar dan tersebar luas di area pedesaan (Tambunan, 2008:4). Lebih jauh Tambunan mengatakan bahwa usaha mikro merupakan usaha tradisional dengan tingkat produktivitas dan kualitas produk yang rendah, perubahan teknologi yang relatif kecil dan lambat serta melayani pasar yang sempit dan terbatas. Dengan adanya kebijakan liberalisasi impor, perubahan teknologi, dan penawaran produk-produk dengan kualitas tinggi, banyak UMK menghadapi kebangkrutan dan sebagian yang lain bertahan namun sulit untuk bersaing. Sebagian besar UMK tersebut berjuang keras untuk mencapai tingkat keuntungan yang subsisten serta beberapa yang lain dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

Keberadaan UMK yang sebagian besar berada di pedesaan memiliki peran penting dalam pengembangan kewirausahaan, khususnya bagi petani pengolah (Tambunan 2008:11). Perkembangan ekonomi yang semakin dinamis memberikan kesempatan dan dorongan kepada petani pengolah untuk berperan aktif dalam perekonomian. Keterlibatan petani pengolah dalam perekonomian di pedesaan biasanya terjadi pada sektor usaha menengah dan kecil. Perkembangan UMK dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan dan 60 persennya merupakan usaha yang dikelola oleh petani pengolah dalam skala kecil (Hani *et al.* 2012:65). UMK yang dikelola petani pengolah biasanya berbasis rumahan (*home-based*) sehingga cenderung terlupakan dan menjadi *invisible entrepreneur* (Ndemo and Maina 2007:21). Keterlibatan petani pengolah dalam kewirausahaan, khususnya dalam sektor informal, berdampak pada kesejahteraan rumah tangga petani pengolah yang berpendapatan rendah dan pembangunan, khususnya di pedesaan (Duflo, 2012:53). Peran petani pengolah dalam pembangunan ekonomi dapat diidentifikasi pada beberapa aspek yaitu penciptaan pekerjaan dan menambah keragaman kewirausahaan dalam perekonomian (Verheul *et al.* 2006:54), pengurangan kemiskinan (Misango and Ongiti 2013:54) serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dengan mengelola ketahanan pangan dan bahkan sebagai pencari nafkah (Sidh and Basu 2011:29).

Wirausaha yang ditekuni oleh petani pengolah menghadapi banyak kendala seperti dukungan pemerintah, stereotipe wirausaha, serta pengakuan legalitas dan formalitas. Hal ini menyebabkan sebagian besar wirausaha petani pengolah bergerak dalam sektor informal dengan teknologi yang sederhana serta kemampuan sumber daya manusia yang belum berkembang sehingga berpengaruh terhadap sistem manajemen usaha yang lemah dan

kapabilitas kewirausahaan yang masih terbatas (Jamali, 2009:39). Kendala utama yang dihadapi oleh petani pengolah dalam mengembangkan usahanya adalah ketersediaan ekuitas keuangan, terutama modal jangka panjang (Baig, 2007:43), dan kemampuan atau kapabilitas manajemen (Chowdhury, 2009:52). Kemampuan mengakses layanan keuangan merupakan faktor kunci bagi UMK untuk berhasil dalam mengembangkan kapasitas produktif dan daya saing serta menciptakan pekerjaan dan berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan di negara berkembang (Christopher, 2011:37).

Kesulitan UMK dalam menjalankan usahanya disebabkan oleh karakteristik pelaku usaha itu sendiri. UMK pada umumnya dilakukan oleh masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan bukan untuk mengeksplorasi peluang. Selain itu masyarakat berpendapatan rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, visi, kreativitas, dan ketekunan berwirausaha dalam ruang lingkup skala usaha yang terlalu kecil untuk mencapai efisiensi serta menghasilkan pendapatan yang minim dan memiliki manfaat yang sangat marjinal (Karnani 2007:28). Meskipun demikian, keberadaan atau pertumbuhan UMK dapat dilihat sebagai fase awal dari perkembangan kewirausahaan (Musnidar dan Tambunan, 2007:36).

Pengembangan kewirausahaan telah dilihat sebagai instrumen dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi sehingga menggerakkan kajian yang bertujuan mengidentifikasi elemen penting untuk menjelaskan dan mempromosikan aktivitas berwirausaha (Kibler, 2012:34). Peran pemerintah dalam mendorong kewirausahaan, khususnya UMK, telah dilakukan baik secara konstitusional, institusional maupun program pembangunan. Secara konstitusional, pemerintah menerbitkan UU No 20 tahun 2008 yang berisi tentang upaya pemerintah dalam mendorong usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam memperkuat pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah mengembangkan infrastruktur yang memadai melalui penguatan fungsi-fungsi lembaga keuangan dan perkoperasian. Disamping itu, pemerintah mengadakan program-program dalam bidang teknologi, keuangan, pemasaran, keberpihakan dalam inovasi dan pengembangan hubungan kerjasama seperti *production linkage* antara usaha kecil dan besar (Hayashi, 2009:49).

Layanan keuangan merupakan instrumen pengembangan UMK yang sejak lama dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung kewirausahaan kecil di Indonesia (Tambunan

2008:78). Dalam mendukung wirausaha skala kecil, pemerintah memberikan kredit subsidi yang disalurkan melalui perbankan dan koperasi unit desa. Program kredit subsidi tersebut meliputi bidang pertanian (BIMAS) serta program investasi dan modal kerja (KIK dan KIMP). Pemerintah juga memberikan kredit murah khususnya di pedesaan yang disalurkan bukan melalui perbankan seperti program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUKESRA (Kredit untuk Kesejahteraan Rakyat), serta kredit untuk pengusaha kecil dan kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong lemah (Martowijoyo 2007:64). Disamping kredit bersubsidi, pemerintah juga mengembangkan berbagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM ini berdiri untuk menopang perekonomian masyarakat yang berada di pedesaan seperti Bank Rakyat Indonesia Unit, Bank Perkreditan Rakyat, lembaga keuangan bukan bank bukan koperasi seperti Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), koperasi seperti koperasi simpan pinjam termasuk Baitul Maal wat Tamwil, dan lembaga keuangan lainnya seperti replikan *Grameen Bank* dan lembaga swadaya masyarakat. Menurut Martowijoyo (2007:39), pada pertengahan tahun 2005, 54 000 outlet LKM berdiri di Indonesia dan telah melayani 29 juta debitur (13 persen populasi) dan 43 juta penabung (19 persen populasi).

Salah satu instrumen yang berperan dalam mengembangkan UMK adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut Karlan and Valdivia (2006:47), LKM merupakan salah satu inovasi kelembagaan finansial yang dirancang dalam rangka penyediaan layanan permodalan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan sekaligus berfungsi sebagai media untuk pendampingan ekonomi dengan memberikan pelatihan usaha. LKM menekankan bahwa kewirausahaan merupakan elemen penting dalam solusi pengembangan pendapatan dan kesejahteraan dengan menciptakan kesempatan langka untuk memahami perkembangan intensi berwirausaha pada kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

Para anggota layanan LKM bertanggung jawab tidak hanya terhadap pembiayaan yang diterima, tetapi juga diharapkan mampu menemukan dan menjalankan usaha yang produktif (Yasid 2010:55). Pembiayaan atau pinjaman yang diterima oleh anggota dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan bila digunakan untuk tujuan produktif (Imai *et al.* 2010:39). Pemanfaatan pembiayaan secara produktif yang ditujukan untuk aktivitas kewirausahaan, baik itu penciptaan usaha baru maupun menambah modal untuk usaha yang

sudah berdiri, diharapkan dapat meningkatkan status kesejahteraan, kemandirian, standar gizi, pendidikan, dan kapasitas sumber daya manusia mereka. Kesiapan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya petani pengolah, dalam memanfaatkan layanan keuangan secara produktif dipengaruhi oleh pertimbangan dalam menilai peluang ekonomi (Mayoux and Harti 2009:67). Mereka akan mempertimbangkan sejauh mana peningkatan pendapatan dapat diperoleh sebagai dampak dari kehadiran layanan tersebut. Keputusan memanfaatkan layanan keuangan mikro untuk aktivitas kewirausahaan, khususnya penciptaan usaha baru, lebih dilatarbelakangi oleh persepsi bahwa berwirausaha merupakan aktivitas yang diinginkan dan layak untuk dijalani sehingga memunculkan intensi individu terhadap kewirausahaan. LKM menekankan bahwa kewirausahaan merupakan elemen penting dalam solusi pengembangan pendapatan dan kesejahteraan dengan menciptakan kesempatan langka untuk memahami perkembangan intensi berwirausaha pada kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

Intensi atau minat diartikan sebagai keadaan pikiran yang mengarahkan perhatian seseorang terhadap suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, yang tercermin dari pengalaman dan tindakan atau langkah tertentu. Intensi dapat diartikan sebagai komitmen untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (Krueger et al. 2000:66), sehingga intensi selalu dikaitkan dengan suatu tindakan berdasarkan rencana atau keputusan yang disadari serta keyakinan dan kecenderungan (Conner and Armitage 1998:44). Intensi kewirausahaan dipertimbangkan sebagai elemen kunci untuk memahami proses pembentukan usaha baru atau proses individu untuk terlibat dalam aktivitas kewirausahaan (Linan et al 2011:50). Hal ini didasarkan bahwa keputusan individu untuk mendirikan usaha dianggap sebagai tindakan yang berdasarkan alasan, atau perilaku yang direncanakan (Ajzen 1991:12). Intensi memiliki fungsi sebagai variabel yang menghubungkan antara sikap terhadap perilaku. Intensi berwirausaha memiliki peran penting yang menghubungkan kehadiran LKM dengan kewirausahaan. Seorang individu yang tidak memiliki intensi kewirausahaan akan memanfaatkan layanan LKM untuk tujuan konsumtif dibandingkan produktif. Hal ini dapat juga dikatakan bahwa keterlibatan dalam kewirausahaan, baik itu mendirikan usaha maupun menambah modal kerja dari layanan yang tersedia, adalah direncanakan dan bukan sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba. Pada akhirnya kewirausahaan mikro dalam bentuk

UMK merupakan kegiatan ekonomi yang secara aktif diinisiasi oleh masyarakat berpendapatan rendah untuk membantu dirinya sendiri terlepas dari kemiskinan.

Shapero and Sokol (1982:62) menyatakan bahwa persepsi seseorang merupakan suatu hal yang sangat penting. Individu tidak berubah, namun persepsi terhadap lingkungan selalu mengalami perubahan. Maka dari itu, Krueger and Brazeal (1994:33) menyatakan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi wirausaha, namun hal ini memerlukan suatu faktor *displacement* agar potensi ini dapat keluar. Intensi terdiri atas tiga konstruk yang mempengaruhi intensi kewirausahaan, yaitu Keyakinan Keinginan (*Perceived Desirability*) yang mengacu pada pengaruh nilai-nilai terhadap persepsi sesuatu yang atraktif dan diinginkan oleh individu. Keyakinan Keinginan berkaitan dengan pengaruh faktor sosial, baik di masyarakat maupun keluarga. Shapero and Sokol (1982:62) mengidentifikasi bahwa budaya, keluarga, teman sejawat, kolega, mentor dan pengalaman pekerjaan sebelumnya merupakan faktor yang mempengaruhi nilai-nilai personal dan persepsi keinginan. Konstruk kedua adalah Keyakinan Kelayakan (*Perceived Feasibility*) berkaitan dengan persepsi individu terhadap tingkat kemampuan mereka melakukan suatu tindakan. Terakhir adalah Kecenderungan untuk Bertindak (*Propensity to Act*) merupakan karakter pribadi untuk bertindak atas keputusan yang dibuat. Secara konseptual, Shapero and Sokol menyarankan lokus kontrol internal sebagai proksi untuk mengukur konstruk ini. Namun tidak ada kesepakatan tentang cara mengukur konstruk ini sehingga beberapa peneliti mengidentikkan dengan optimis yang dipelajari atau kecenderungan mengambil risiko atau toleran terhadap ambiguitas (Lorz 2011:45).

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Agam disamping sebagai sentra penghasil produk hortikultura yang tidak kalah pentingnya adalah kabupaten ini juga merupakan sentra penghasil gula merah tebu., hal ini dapat dilihat luas tanaman tebu (Lampiran 2). Produksi gula merah tebu pada daerah inilah yang selama ini telah memenuhi permintaan pasar tradisional Sumatera Barat, Riau dan Malaysia. Pada daerah ini, pengolahan tebu menjadi gula merah tebu dilakukan langsung oleh petani tebu. Kebanyakan teknis pengolahan masih dilakukan secara semi modren yang dilakukan turun temurun dengan teknik pengolahan secara

manual yang menggunakan tenaga kerbau. Namun ada beberapa industri pengolahan gula merah tebu di Kabupaten Agam sudah mulai diolah dengan menggunakan mesin tenaga diesel.

Kecamatan Matur dan Canduang merupakan daerah penghasil produksi gula merah tebu terbesar di Kabupaten Agam, dapat dilihat dari luas areal tanaman tebu dan hasil produksi tanaman tebu (Lampiran 3). Kecamatan Matur dan Canduang merupakan daerah sentral produksi (Lampiran 4). Pada Kecamatan ini tebu merupakan komoditi unggulan Kecamatan Matur dan Canduang. Masyarakat di Kecamatan Matur dan Canduang telah berupaya menciptakan nilai tambah pada usaha tani tebunya. Upaya peningkatan nilai tambah yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah mengolah tebu menjadi gula merah tebu. Pada umumnya petani yang berprofesi sebagai petani tebu di Kecamatan Matur dan Canduang ini langsung berperan sebagai penghasil gula merah tebu. Kegiatan pengolahan tebu menjadi gula merah tebu dilakukan masyarakat Kecamatan Matur dan Canduang dalam skala industri rumah tangga.

Pengembangan kewirausahaan telah dilihat sebagai instrumen dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi sehingga menggerakkan penelitian yang bertujuan mengidentifikasi elemen penting untuk menjelaskan dan mempromosikan serta mendukung aktivitas berwirausaha. Peran pemerintah dalam mendorong dan mendukung kewirausahaan, khususnya UMK, telah dilakukan baik secara konstitusional, institusional maupun program pembangunan. Layanan keuangan merupakan instrument pengembangan UMK yang sejak lama dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung kewirausahaan kecil di Indonesia (Tambunan 2008:67). Disamping kredit bersubsidi, pemerintah juga mengembangkan berbagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menopang perekonomian masyarakat di pedesaan seperti Bank Rakyat Indonesia Unit. Menurut Martowijoyo (2007:42), pada pertengahan tahun 2005, 54.000 outlet LKM berdiri di Indonesia dan telah melayani 29 juta debitur (13 persen populasi) dan 43 juta penabung (19 persen populasi).

Salah satu model LKM yang dianggap berhasil dan mendapat perhatian banyak kalangan sebagai contoh keberhasilan model pelayanan kepada UMK di pedesaan adalah *Grameen Bank*. Model *Grameen* memberikan alternatif yang berbeda dalam menyediakan

layanan kepada masyarakat berpendapatan rendah melalui pendekatan pelayanan yang mendasarkan pada kekuatan modal sosial kelompok. Keberadaan model LKM ini dapat dilihat sebagai kegagalan skema kredit pedesaan oleh pemerintah dalam menjangkau secara luas pada masyarakat yang berpendapatan rendah dan dinilai kurang menguntungkan oleh perbankan (Masyita and Ahmed 2012:36). Meskipun demikian, secara umum, lembaga keuangan mikro belum memberikan bukti dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah bahkan beberapa kasus dapat menyebabkan keterpurukan apabila kondisi pasar mengalami stagnasi (Chowdhury 2009:82).

Menurut Martowijoyo (2002:17), lahirnya lembaga keuangan mikro di tengah-tengah masyarakat desa, khususnya petani adalah suatu akibat dari gagalnya skema sistem perkeditan yang dilakukan oleh perbankan, dikarenakan sulitnya akses petani untuk menjangkau serta besarnya jumlah agunan dan ketatnya peraturan yang harus dipenuhi oleh petani. Berdasarkan keadaan tersebut lahirlah lembaga keuangan mikro yang siap melayani petani dengan pendapatan kecil untuk membantu menyokong usaha pertanian yang mereka lakukan dengan agunan dan peraturan yang lebih mudah. Salah satu lembaga keuangan yang ikut berpartisipasi dalam upaya membantu petani pengolah tebu menjadi saka di kabupaten Agam tersebut adalah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), Koperasi, SPP (Simpan Pinjam Perempuan), Lembaga Keuangan Mikro Non Koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pendirian Lembaga Keuangan ini bertujuan sebagai tempat para petani bisa mendapatkan pinjaman untuk tambahan modal usaha. Banyaknya petani yang sulit mencari pinjaman modal membuat rendahnya kemampuan petani untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Salah satu tujuan dari pendirian lembaga keuangan ini adalah untuk memfasilitasi para anggotanya untuk bisa mendapatkan bantuan modal dalam mengembangkan usahatani yang sedang mereka tekuni. Salah satu faktor yang membuat masih bertahannya lembaga keuangan ini adalah sistem mekanismenya yang memperhatikan kearifan lokal.

Menurut Martowijoyo (2002:17) lemahnya permodalan pelaku ekonomi dipedesaan telah disadari oleh pemerintah dan akhirnya terdorong untuk meluncurkan beberapa kredit program pemerintah yang ditujukan kepada petani dan pengusaha kecil dan mikro sejak Repelita I. Dimulai sejak kredit Bimas pada tahun 1972, kemudian menyusul kredit

program lainnya seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani/ Nelayan Kecil (P4K), Kredit Usaha Tani (KUT) dan sampai saat ini masih berlangsung Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Walau pemerintah telah mengimplementasikannya dalam berbagai macam bentuk program, namun capaian hasilnya dipandag masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Martowijoyo (2002:17), lemahnya kinerja lembaga keuangan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (1) rendahnya pelunasan kredit; (2) rendahnya moralitas aparat pelaksana; (3) rendahnya tingkat mobilisasi dana masyarakat; (4) rendahnya serapan kredit di masyarakat dan perputaran serta pengembalian modal yang lambat akibat penggunaan modal yang salah. Kelemahan tersebut membawa konsekuensi pada tidak berlanjutnya lembaga keuangan yang dibentuk setelah program selesai. Akibatnya, peserta program umumnya akan kembali mengalami kekurangan modal usaha.

Introduksi lembaga keuangan mikro bagi masyarakat berpendapatan rendah di daerah Sumatera Barat khususnya Kabupaten Agam ini tidak berarti secara positif akan mendorong untuk berpartisipasi aktif pada kewirausahaan. Karena jika banyaknya dana yang disalurkan ke masyarakat melalui bantuan lembaga keuangan, namun ketidak cakapan masyarakat dalam mengalokasikan modal kearah yang produktif, kurangnya perhatian pemerintah terhadap kualitas petani, serta minimnya tenaga pendamping lapangan yang siap memberikan arahan tentu akan merugikan kedua belah pihak. Hal ini bisa kita lihat dari tabel data angka serapan dana finansial dan tingkat pengembelian dana pinjaman melalui program PUAP di Kabupaten Agam periode bulan Februari 2016 pada tabel berikut:

Tabel 1. Angka Serapan Dana Finansial Dan Tingkat Pengembelian Dana Pinjaman Melalui Program PUAP Di Kabupaten Agam Periode Bulan Februari 2016

Nama Gapoktan/LKMA	Kecamatan /Nagari/Jorong/Desa	Jumlah dana (000)	Real penyaluran dana ke LKMA (000)	Total pembiayaan (000)	Piutang (000)	Tunggakan (000)	NPL (%)
Bukik Batabuah	Canduang/Bukik Batabuah	100.000	100.000	337.763	84.219.000	84.219.000	100%
Sepakat	Canduang Koto Laweh	100.000	100.000	759.790	93.400.000	93.400.000	100%
Nan Dihati	Canduang/	100.000	100.000	423.600	111.476.000	79.830.000	87%

Lanjutan Tabel 1. Angka Serapan Dana Finansial Dan Tingkat Pengembelian Dana Pinjaman Melalui Program PUAP Di Kabupaten Agam Periode Bulan Februari

	Lasi(Pasanehan)						
Wahana Tani	Matua/Matua Hilia	100.000	100.000	411.500	79.830.000	79.830.000	100%
Cahaya Tani	Matua/Matua Mudiak	100.000	100.000	368.740	48.826.000	48.826.000	100%
Bungo Tabu	Matua/Lawang	100.000	100.000	400.500	48.826.000	48.826.000	100%
Alam Tani	Matua/Parik Pnjang	100.000	100.000	170.180	91.230.000	91.230.000	100%
Taruko	Matua/Tigo Balai	100.000	100.000	125.000	100.868.500	67.500.000	67%
Serasi	Matua/Panta Pauh	100.000	100.000	361.000	100.060.000	86.660.000	87%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Agam, 2017

Dari tabel serapan dana finansial dan tingkat pengembelian dana pinjaman melalui program PUAP dapat dilihat bahwa seluruh dana yang di kucurkan oleh pemerintah dalam program PUAP telah digunakan sepenuhnya oleh anggota LKMA/ Gapoktan. Namun dapat dilihat pada angka piutang dan tunggakan yang mana dana yang dipinjamkan oleh LKMA pada laporan perkembangan aset periode bulan Februari 2016 masih tinggi , dengan nilai NPL mencapai 100%. Hal ini menjelaskan bahwa dana yang dipinjamkan belum kembali atau memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Untuk keseluruhan angka serapan dana pinjaman pada program PUAP di Sumatera Barat dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Angka Serapan Dana Pinjaman Pada Program PUAP Di Sumatera Barat

Total dana PUAP anggaran tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013	2.400.000.000	100,00%
Total dana yang dikucurkan dari Gapoktan ke LKMA	2.250.000.000	93,73%
Sisa dana PUAP anggaran tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013	150.000.000	6,67%
Perkembangan dana PUAP tahun 2009. 2010, 2011, 2012, 2013	2.973.141.647	24,33%
Tunggakan/ NPL yang sudah digulirkan ke petani	1.432.370.288	67,89%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Agam, 2017

Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik itu internal maupun eksternal. Dalam hasil penelitian dari Abadi (2014:85) salah satu hal yang menyebabkan tingginya nilai NPL atau kredit macet di Lembaga Keuangan Mikro adalah rendahnya keinginan kewirausahaan nasabah yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,783 dengan nilai signifikansi 0,006. Hal ini merupakan penyalahgunaan dana pinjaman untuk

kegiatan konsumtif, sehingga sulit bagi nasabah untuk mengembalikan kembali dana yang telah dipinjamkan, karena seperti yang diketahui bahwasanya tujuan dari penyaluran kredit pinjaman di lembaga keuangan mikro adalah untuk pendirian usaha, perluasan skala usaha atau untuk modal usaha. Hal serupa juga ditunjukkan oleh hasil penelitian dari Fofied (2015:88) yang menjelaskan bahwa sikap kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai NPL atau kredit macet di LKMA yang ditunjukkan dengan besarnya t hitung 2,512 dengan nilai signifikansi 0,013.

Kecenderungan utama adalah faktor ekonomi yang belum memberikan prospek positif untuk mendorong tumbuhnya usahatani para petani. Persepsi masyarakat terhadap peluang ekonomi yang terbatas berpengaruh terhadap mengalihkan pemanfaatan layanan keuangan mikro tersebut untuk kegiatan non-produktif yang tidak memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan secara langsung bagi pemanfaatnya. Kesiapan petani berpendapatan rendah dan yang memiliki modal kecil dalam memanfaatkan layanan keuangan secara produktif dipengaruhi oleh pertimbangan dalam menilai peluang ekonomi, keyakinan dan kecenderungan (Mayoux and Harti, 2009:21).

Mereka akan mempertimbangkan sejauh mana peningkatan pendapatan dapat diperoleh sebagai dampak dari kehadiran layanan tersebut. Intensi kewirausahaan memiliki peran penting dalam menghubungkan kehadiran lembaga keuangan mikro dengan kewirausahaan. Seseorang individu yang tidak memiliki intensi kewirausahaan akan memanfaatkan layanan lembaga keuangan mikro untuk tujuan konsumtif dibandingkan produktif. Hal ini dapat juga dikatakan bahwa keterlibatan dalam kewirausahaan, baik itu mendirikan usaha maupun menambah modal kerja dari layanan yang tersedia, adalah direncanakan dan bukan yang dilakukan secara tiba-tiba.

Kesiapan anggota keuangan mikro dalam memanfaatkan layanan pembiayaan untuk aktivitas kewirausahaan akan dipengaruhi oleh ketersediaan peluang ekonomi dan kemampuan dalam mengeksplorasi kesempatan tersebut. Sejauh mana peluang tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka sendiri menjadi pertimbangan pilihan-pilihan dalam memanfaatkan layanan keuangan mikro untuk aktivitas kewirausahaan, khususnya penciptaan usaha baru. Penelitian tentang peningkatan efektivitas keuangan mikro sudah banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan kepada aspek

dampak pelayanan dengan berbagai indikasi bentuk skema pembiayaan seperti pembiayaan dengan atau tanpa pelatihan dan pembiayaan berbasis individu atau kelompok (Karlán and Valdivia 2011:47) serta pembiayaan dengan bayaran yang fleksibel. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya kurang memperhatikan kondisi pribadi individu anggota itu sendiri berkaitan dengan proses pra pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan pembiayaan untuk menciptakan usaha baru atau disebut dengan intensi berwirausaha. Dorongan anggota dalam memanfaatkan pembiayaan untuk menciptakan usaha baru dapat dipengaruhi oleh faktor individual serta lingkungan sosial dan ekonomi anggota itu sendiri. Oleh karena itu, kesempatan untuk memahami kewirausahaan dengan lebih baik adalah dengan menguraikan keyakinan-keyakinan yang berada dibalik intensi berwirausaha (Krueger 2007:14).

Kesediaan anggota keuangan mikro dalam memanfaatkan layanan pembiayaan untuk aktivitas kewirausahaan akan dipengaruhi oleh ketersediaan peluang ekonomi dan kemampuan dalam mengeksplorasi kesempatan tersebut. Sejauh mana peluang tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka sendiri menjadi pertimbangan pilihan-pilihan dalam memanfaatkan layanan keuangan mikro untuk aktivitas kewirausahaan, khususnya penciptaan usaha baru. Keputusan memanfaatkan layanan keuangan mikro untuk menciptakan usaha baru akan dipengaruhi oleh persepsi bahwa berwirausaha merupakan aktivitas yang diinginkan dan layak untuk dijalani sehingga memunculkan intensi individu terhadap kewirausahaan. Karena jika seseorang memiliki intensi berwirausaha yang baik, maka penggunaan modal pinjaman dari lembaga keuangan tentu akan berjalan dengan produktif.

Fishbein & Ajzen (1975:42), menjelaskan bahwa keinginan atau niat disebut sebagai intensi. Intensi merupakan suatu komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu. Intensi merupakan kunci utama untuk memprediksi perilaku manusia dan sebagai sebuah konstruk psikologis yang menunjukkan kekuatan motivasi seseorang dalam hal perencanaan yang sadar dalam usaha untuk menghasilkan perilaku yang dimaksud dimasa yang akan datang. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan dalam Hadistnya sekitar 14 abad yang lalu, beliau bersabda :“Sesungguhnya setiap perbuatan seseorang itu tergantung pada niatnya” (HR.Bukhari).

Hadist ini menjelaskan bahwa segala perbuatan seseorang itu akan sangat bergantung pada niatnya atau dengan kata lain berdasarkan intensinya.

Meneliti intensi atau niat seseorang dan kelompok untuk berwirausaha merupakan suatu cara untuk memprediksi perilaku berwirausaha mereka dikemudian hari. Intensi kewirausahaan dapat diartikan sebagai proses pencarian informasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembentukan suatu usaha (Katz & Gartner 1988:10). Intensi kewirausahaan adalah prediksi yang reliabel untuk mengukur perilaku kewirausahaan dan aktivitas kewirausahaan (Krueger et al. 2000:34). Umumnya, intensi kewirausahaan adalah keadaan berfikir yang secara langsung akan mengarahkan perilaku individu ke arah pengembangan dan implementasi konsep bisnis yang baru (Bird, 1998:23). Intensi berwirausaha pada petani merupakan suatu keinginan kuat yang terdapat dalam diri seseorang petani untuk mengelola suatu usaha yang dapat memberi lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain dengan bekal kemandirian, keberanian, dan kreativitas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat intensi berwirausaha petani pengolah gula merah tebu di Kabupaten Agam?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi intensi berwirausaha petani pengolah gula merah tebu?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi tingkat intensi berwirausaha petani pengolah gula merah tebu di Kabupaten Agam
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi intensi berwirausaha petani pengolah gula merah tebu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti:

1. Pengelola Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Agam, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan layanan yang lebih berdampak pada kesejahteraan anggota layanannya dan masyarakat secara luas.
2. Pengambil kebijakan, penelitian ini berguna sebagai bahan referensi dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan yang berkaitan dengan program-program kredit mikro.
3. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai pondasi dalam meningkatkan motivasi pengembangan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di kampus.

